

Kepemimpinan politik: Peran Walikota dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Bontang

Windy Widya Pratiwi^{1*}

¹Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga

*E-mail: windywidya06@gmail.com

Abstract: This research discusses about the leadership model of Bontang City Mayor for the tenure period of 2016-2021, Neni Moerniaeni, in implementing the poverty alleviation policy in Bontang. As one of the small cities located in East Kalimantan Province, Bontang has a promising natural resource potential. However, because most of its natural resources are non-renewable, it then requires the Government of Bontang to look for other alternatives to reduce the poverty level. One of the efforts was done through policies including 'Pesisir juga Kota', Kube FM, PRODUTA, Kotaku, and other policies. Other poverty alleviation effort is by attracting the interest of investors through the companies' CSR programs and Industrial development. The leadership model of the mayor also shows that her way of handling the poverty is not only through cooperating with companies, but the government also have their own programs. This research will see what the tendency of the mayor's political leadership model is in implementing poverty alleviation policies. This research used the theory of Herbert Feith (1962), where the leadership model is divided into two: Solidarity Maker type which prioritize the strength of the people, and the administrator's type which handle the poverty problems through administrative approach and policies implementation.

Keywords: *Leadership Model, Poverty, Policy Implementation*

PENDAHULUAN

Jika kita berbicara tentang pembangunan nasional maka tidak dapat terlepas dari kata kesejahteraan. Salah satu dari perwujudan kesejahteraan tersebut adalah mengentaskan permasalahan kemiskinan. Tidak hanya upaya pemberantasan kemiskinan secara nasional, akan tetapi upaya ini juga dapat dilakukan oleh provinsi dan daerah. Jika sudah berbicara lingkup tersebut maka tidak dapat kita lepaskan dari hadirnya sosok seorang pemimpin. Peralannya untuk mewujudkan hal tersebut peran pemimpin menjadi sangat penting, di mana ia harus mampu mengarahkan organisasi pemerintahan di bawah kekuasaannya. Serta akan terlihat peranan seorang pemimpin bagaimana ia mampu menggerakkan organisasinya untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Apalagi jika kita lihat pengertian dari pemimpin sendiri merupakan seseorang yang membimbing dan mampu memimpin dengan kualitas persuasifnya dan diterima secara sukarela oleh para pengikutnya, maka tidak salah jika dikatakan peran kepemimpinan sangat dibutuhkan untuk menjalankan sebuah pemerintahan (Fairchild, 2006).

Kemiskinan merupakan salah satu problematik yang kerap kali dihadapi oleh suatu negara bahkan terjadi di setiap daerah. Tuntutan global dalam proses penyejahteraan masyarakat oleh pemerintah



masih menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa. Dari data yang dirilis oleh lembaga amal anti kemiskinan, Oxfam Internasional, Indonesia menduduki urutan ke-90 dari 157 negara dengan ketimpangan antara si kaya dan si miskin (Wijaya, 2018). Adanya peringkat tersebut menjadikan pemerintah memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menurunkan peringkat kemiskinan tersebut. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah kemiskinan berkisar pada 9,41% per Maret tahun 2019, angka itu mengalami penurunan dari tahun 2018 yakni 9,82% (Laucereno, 2019). Bontang merupakan salah satu kota di Indonesia yang juga menghadapi problem kemiskinan di wilayahnya, dan hal ini merupakan tuntutan pengentasan yang harus dilakukan oleh kepala daerah yaitu Walikota Bontang Neni Moerniaeni. Pasalnya sudah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang pemimpin daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Salah satu dari sukseksi kesejahteraan itu adalah menuntaskan angka kemiskinan yang ada di wilayah kekuasaannya.

Kota Bontang merupakan salah satu kota administratif yang ada di provinsi Kalimantan Timur. Kota yang berdiri sejak tahun 1996 itu memiliki angka kemiskinan berkisar 5,18% pada tahun 2016. Angka tersebut mengalami penurunan yang cukup sedikit yakni hanya berkisar 0,2% di tahun 2017 yang kemudian berkisar 5,16% (BPS Kota Bontang, 2018) . Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penurunan dengan angka yang cukup rendah belum mengidentifikasi perubahan yang signifikan terhadap Kota Bontang. Perlu diketahui bahwa Kota Bontang adalah kota dengan indeks pembangunan manusia yang mencapai 79,47%. Angka ini adalah angka yang dapat dikatakan luar biasa, bahkan dengan angka sebesar itu seharusnya Kota Bontang adalah kota dengan pembangunan daerah yang baik dan tertinggi di Kalimantan Timur mengalahkan Samarinda dan Balikpapan. Selain itu perlu diketahui bahwa Kota Bontang memiliki sumber daya alam migas, batu bara, biota laut, perkebunan, dan sebagainya.

Kondisi-kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan antara potensi kekayaan alam yang dimiliki namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan yang ada. Padahal kota dengan luas 349,77 km² itu tidak hanya memiliki potensi alam yang luar biasa akan tetapi juga potensi industri. Hadirnya Perusahaan besar seperti PT. Badak dan PT. Pupuk Kaltim tentunya juga akan memberikan pengaruh bagi pembangunan Kota Bontang. Selanjutnya adalah bagaimana pemimpin mampu memanfaatkan kehadiran dari kedua perusahaan besar tersebut untuk berkontribusi aktif terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Bontang. Hal ini juga akan menjadi salah satu aspek penilaian di mana seseorang dapat dikatakan sebagai pemimpin politik yang berhasil apabila ia mampu memanfaatkan dan menguasai potensi dan peran aktor lain yang ada untuk berkontribusi dengan pemerintah guna mewujudkan kebaikan bersama (Mahyudin & Alfian, 2009).

Dalam mewujudkan penurunan angka kemiskinan di Kota Bontang, selain adanya kebijakan yang dapat diterapkan dengan baik, dibutuhkan hubungan yang sinkron antara pemimpin dan organisasi

pemerintahan yang ada. Peralnya, dari baiknya komunikasi yang terjalin antara pemimpin dan organisasi akan memunculkan perspektif politik yang sama, dan untuk menilai itu maka tidak hanya elemen pemimpin ataupun bawahan saja yang dapat dilihat, akan tetapi keduanya. Bahkan, untuk membuktikan persamaan perspektif dari pemimpin dan bawahan juga dapat kita lihat dari respons masyarakat yang terlibat secara langsung, hal tersebut agar tidak terjadi pandangan kepemimpinan yang hanya dari satu sudut pandang saja tetapi bisa lebih sebagai pertimbangan (Fitriastuti, 2011). Peralnya kita dapat melihat tipe kepemimpinan seorang pemimpin tidak hanya dengan menilai pemimpin itu semata, tetapi kita juga harus melihat kinerja bawahannya serta pandangan mereka juga melihat bagaimana respons masyarakat akan kepemimpinan yang ada. Hal tersebut dilakukan agar kita dapat menilai tipe kepemimpinan seseorang secara menyeluruh, bukan hanya dari satu penilaian saja.

Dalam penelitian yang ada sebelumnya sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang ada, Pemerintah Kota Bontang melakukannya dengan mengimplementasikan kebijakan kemiskinan dan melakukan kerja sama dengan perusahaan yang ada. Setidaknya pada tahun 2014 ada sekitar 384 perusahaan yang terdaftar di Kota Bontang. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar tersebut terdiri dari perusahaan besar ataupun usaha rumahan. Kendati demikian masih ada beberapa perusahaan yang sulit untuk menjalankan kewajiban mereka berperan dalam penanganan kemiskinan. Sehingga hanya ada beberapa perusahaan yang melakukan kewajibannya dalam forum CSR (Arianto et al., 2017). Selain itu ada kebijakan yang belum dapat terealisasi secara optimal. Dengan begitu lalu bagaimanakah peran dan tindakan yang akan di ambil oleh Walikota Bontang untuk menegakkan kebijakan dan peran perusahaan tersebut agar mampu berkontribusi secara optimal pada pengentasan kemiskinan di Kota Bontang. Dengan hal itu kemudian akan terlihat tipe kepemimpinan seperti apa yang sesuai dengan kepemimpinan Walikota Bontang saat ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya seorang pemimpin akan memperlihatkan tipe kepemimpinan mereka masing-masing, yang dimana itu merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Banyak tokoh yang memberikan pandangannya terhadap tipe kepemimpinan seseorang seperti misalnya yang diungkapkan oleh W. M Conway yang dipengaruhi oleh Le Bon (1897) dimana ia mengklasifikasikan tipe kepemimpinan menjadi tiga yakni:

- a. The crowd-compeller, merupakan tipe kepemimpinan yang cenderung memaksakan kehendaknya kepada khalayak umum atau kelompok lain

- b. The crowd-exponent, adalah tipe kepemimpinan penerjemah atau bentuk tampilan dari khalayak atau kelompok
- c. The crowd-representative, ialah yang menjadi wakil atau utusan dari khalayak ramai. (Kartono, 1994)

Untuk melihat tipe kepemimpinan politik seseorang tentunya akan mengarah atau lebih condong terhadap salah satu tipe. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang memiliki lebih dari satu tipe kepemimpinan, namun akan ada satu tipe yang lebih dominan dari tipe kepemimpinan yang dimiliki. Dalam penelitian ini analisis tipe kepemimpinan yang akan digunakan adalah klasifikasi tipe kepemimpinan menurut Herbeth Feith (1962). Dimana ia membagi tipe kepemimpinan menjadi dua, yakni *solidarity maker* dan *administratoris*.

a. Tipe *Solidarity Maker*

Tipe kepemimpinan *Solidarity Maker* adalah tipe kepemimpinan yang mengarah kepada bagaimana seorang pemimpin mampu menyatukan masyarakatnya untuk bergabung bersama. Karena kepercayaan dan persatuan yang mereka miliki merupakan modal utama untuk memajukan suatu wilayah dan untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya secara bersama. Keunggulan dari tipe kepemimpinan ini adalah bagaimana kekuatan emosi dan kharisma yang dimiliki oleh pemimpin tersebut mampu mempengaruhi dan menarik perhatian massa atau pendukungnya sehingga tipe pemimpin model ini lebih mudah untuk memperoleh hati rakyat. Hal yang paling mencolok pada tipe kepemimpinan ini adalah memperlihatkan kekuatan yang dimiliki pemimpin dalam memperoleh dukungan dari rakyatnya melalui persatuan atau kekuatan bersama yang terjalin diantara mereka. Kekuatan dari kebersamaan merekalah yang menjadi sumber bagi pemimpin untuk menjalankan kepemimpinannya. Namun yang menjadi salah satu kelemahan dari tipe kepemimpinan kubu adalah kemampuan memenuhi janji mereka. Pasalnya tidak sedikit pemimpin tipe ini yang terpilih dari kekuatan rakyatnya hanya mengumbar janji-janji semata tanpa mewujudkannya ketika ia memimpin.

b. Tipe *Administratoris*

Pada tipe kepemimpinan *administratoris* hal yang paling dominan adalah bagaimana seorang pemimpin mampu mengelola. Yang dimaksud mengelola disini adalah bagaimana seorang pemimpin memiliki kemampuan lebih dalam merencanakan dan mengimplementasikan sebuah kebijakan dalam

pemerintahannya. Selain itu tipe kepemimpinan *administratoris* dianggap mampu untuk menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. memanfaatkan dan mengembangkan modernisasi yang ada, seperti pengembangan teknis yang teknologi, industri, dan manajemen modern, dan perkembangan sosial di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif - deskriptif dengan studi kasus Kepemimpinan Walikota Bontang dalam Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan. Adapun tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya tipe kepemimpinan Walikota Bontang dalam mengimplementasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang ada. Subyek dari penelitian ini sendiri adalah Walikota Bontang, dinas-dinas terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, wartawan, dan masyarakat Bontang sendiri. Selanjutnya untuk memperoleh data akan dilakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang sudah disesuaikan dengan rumusan masalah. Untuk melengkapi hasil wawancara maka akan dilengkapi oleh data-data sekunder lainnya.

PEMBAHASAN

Tipe Kepemimpinan Walikota Bontang dalam Implementasi Kebijakan Kemiskinan

Mengatasi permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang mudah, pasalnya kemiskinan itu sendiri sifatnya dinamis. Dikatakan dinamis karena terkadang ketika ada seseorang yang mampu lepas dari kategori kemiskinan kemudian ada masyarakat lain yang memenuhi karakteristik dari seseorang yang tergolong miskin. Hal inilah yang kemudian menjadikan upaya pengentasan kemiskinan adalah hal yang sulit direalisasikan. Menggunakan satu cara saja tidak cukup untuk mengentaskan masalah kemiskinan, bahkan banyak program kebijakan tentang penanganan kemiskinan pun terkadang masih belum efektif untuk mengatasi problem kemiskinan itu sendiri. Inilah yang kemudian membutuhkan peran aktif tidak hanya dari pemerintah pusat saja akan tetapi juga provinsi dan daerah, bahkan elemen lain seperti sektor ekonomi juga harus berperan dalam pengentasan kemiskinan.

Tak terkecuali yang terjadi di Kota Bontang, penanganan kemiskinan telah diupayakan melalui berbagai cara salah satunya melalui program pengentasan kemiskinan. Di bawah kepemimpinan Walikota saat ini, Neni Moerniaeni Kota Bontang memiliki angka kemiskinan sebesar 4,67% di tahun 2018. Angka tersebut menurun sebesar 0,49 dari tahun sebelumnya di mana pada tahun 2017 angka kemiskinan berada pada angka 5, 18%. Penurunan angka kemiskinan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran kepemimpinan Walikota yang ada dengan menjalankan program-program kemiskinan yang ada melalui pemerintahannya (BPS Kota Bontang, 2018). Di Kota Bontang program kebijakan yang ada tidak hanya berasal dari kebijakan yang berlaku secara nasional saja, akan tetapi juga ada beberapa program yang memang berasal dari pemerintah Kota Bontang ataupun provinsi.



Kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh Pemkot Bontang sendiri seperti kebijakan Pesisir juga kota, Program dua ratus juta per RT, santunan kematian untuk masyarakat mendekati miskin, dan program RUSUNAWA. Selain itu ada juga program kebijakan kemiskinan yang dijalankan Pemkot bekerja sama dengan Provinsi seperti program Kelompok usaha bersama fakir miskin. Selain kerja sama dari pemerintah daerah dan provinsi ada kebijakan dari pusat yang dijalankan di Kota Bontang. Di antaranya kebijakan itu adalah Bantuan pangan non tunai, KOTAKU, Program keluarga harapan dan lain sebagainya. Program-program tersebut dijalankan oleh Pemkot Bontang dengan beberapa inovasi.

Salah satu program kemiskinan yang ada di Kota Bontang dan merupakan program asli Pemkot adalah program “Pesisir juga Kota” ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Bontang untuk memperbaiki cara hidup masyarakat pesisir. Pasalnya di Kota Bontang sendiri tingkat kemiskinan terbesar terjadi di daerah pesisir. Hal tersebut salah satunya karena sulitnya kemudahan masyarakat pesisir untuk memperoleh sarana prasarana dari pemerintah. Salah satu wujud dari adanya program pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir adalah melalui penyediaan WIFI. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat pesisir yang selama ini terkenal masih memegang teguh mitos dalam kehidupan mereka mampu mengalami perubahan. Perubahan yang diharapkan ini agar masyarakat pesisir dapat memperoleh informasi lebih cepat dan kemudahan komunikasi. Pasalnya salah satu penyebab masyarakat pesisir mengalami kemunduran tersebut karena sulitnya komunikasi dan informasi yang diperoleh.

Salah satu upaya menyediakan media komunikasi untuk menghilangkan mitos di masyarakat. Hal tersebut karena keteguhan mitos yang dianut oleh masyarakat menyebabkan keterasingan informasi dan komunikasi di masyarakat. Itulah kemudian mengapa pemerintah menyediakan sarana komunikasi dan informasi tersebut di kehidupan masyarakat pesisir. Selain sebagai upaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi, ini juga merupakan upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Bontang. Cara ini merupakan cara yang mengadaptasi dari sistem modernisasi yang ada saat ini, sehingga pemimpin memanfaatkan teknologi dan modernisasi yang ada untuk mengentaskan kemiskinan.

Salah satu yang menjadi penyebab tingkat kemiskinan di masyarakat pesisir tidak mengalami kemajuan yang pesat adalah karena sistem pengklasifikasian kategori miskin yang ada. Misalnya saja seperti ini, dalam kehidupan masyarakat pesisir dengan kondisi lingkungan yang mereka alami lebih memudahkan mereka untuk membangun rumah dari bahan kayu. Kemudian dengan alasan lebih praktis atau efisien mereka menggunakan toilet cemplung atau langsung ke laut. Padahal hal tersebut juga dapat mempengaruhi kesehatan mereka, walaupun sebenarnya dengan cara tersebut belum tentu masyarakat pesisir benar-benar berada pada garis kemiskinan. Penilaian dari pemerintah pusat yang memberikan poin dalam fasilitas yang dimiliki oleh masyarakatlah yang terkadang menjadikan masyarakat tersebut tidak mampu lepas dalam garis kemiskinan. Hal tersebut yang dirasakan oleh pemerintah Bontang,

dimana ketika survei masyarakat sebenarnya dalam keadaan mampu akan tetapi tetap berada dalam garis kemiskinan karena poin mereka yang tinggi. Inilah salah satu problem kemiskinan yang belum terentaskan karena adanya sistem yang ada.

Ini merupakan bukti bahwa kurang adanya sinkronisasi dari pemerintah pusat dengan daerah. Pasalnya pusat memiliki indikator untuk mengategorikan seseorang ke dalam keluarga miskin.

“ Ada 20 indikator yang dijadikan patokan untuk mengategorikan penduduk itu sebagai masyarakat miskin. Nah untuk toilet dan kondisi rumah itu yang biasanya menyumbangkan poin tinggi untuk kategori miskin.” (Wawancara dengan Dinas Sosial)

Dengan kondisi tersebut akhirnya menciptakan struktur masyarakat yang miskin. Maksudnya adalah masyarakat yang sebenarnya dalam keadaan mampu menjadi masuk dalam kategori miskin karena kondisi rumah tersebut. Perbedaan penilaian antara masyarakat dan pemerintahan menjadikan tolak ukur kemiskinan mengalami perbedaan. Bagi masyarakat wc cemplung adalah yang paling praktis dan sesuai dengan lingkungan. Akan tetapi bagi pemerintah itu menjadi sebuah permasalahan karena akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Inilah yang kemudian perlu dibenahi untuk kemudian mampu menyamakan persepsi antara masyarakat dan pemerintah agar ada satu tolak ukur yang sama dalam pemerintahan.

Adanya program pesisir juga kota tersebut memperlihatkan bahwa pemimpin Kota Bontang memiliki suatu inovasi dalam hal kebijakan. Hal tersebut terlihat dari upaya yang dilakukan dengan mengadakan program pesisir juga kota ini. Program ini dijalankan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Dengan menyediakan WIFI tersebut berarti di kepemimpinan ini mengupayakan agar masyarakat bisa mengenal teknologi dan mendapatkan informasi dengan lebih mudah. Selain itu dengan adanya program ini juga pemimpin melakukan suatu usaha agar masyarakat pesisir tidak hanya terpaku dengan mitos dan mampu berkembang. Namun tujuan utama dari program ini adalah untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di wilayah pesisir, mengingat rata-rata masyarakat di sana masih tertutup terhadap dunia luar.

Selain melalui program pembangunan tersebut pemerintah Bontang juga memiliki program RUSUNAWA (Rumah Susun Sederhana Sewa). Pembangunan ini ditujukan untuk masyarakat miskin yang belum memiliki rumah untuk dihuni, makanya disediakan rumah sewa dengan biaya murah. Selain itu untuk memasuki rusunawa ini masyarakat juga harus diseleksi. Untuk RUSUNAWA ini sendiri pemerintah Bontang melakukan pembangunan di tiga tempat yakni Kelurahan Api-Api, Kelurahan Guntung, dan Kelurahan Loktuan. Namun yang sudah beroperasi hingga saat ini yang berada di Kelurahan Api-Api. Namun pada realitasnya pemerintah kurang tegas, terbukti dengan masuknya para penyewa yang berasal dari pegawai pemerintahan. Padahal jika kita telaah kembali pegawai pemerintah merupakan kategori masyarakat yang mampu. Hal ini menunjukkan kurangnya ketelitian dan ketegasan

pemerintahan dalam menjalankan kebijakan yang telah mereka rencanakan. Dan hal ini tak bisa kita lepaskan dari peran kepemimpinan seorang Walikota. Hal tersebut karena seharusnya seorang pemimpin mampu mengontrol dan mengevaluasi kebijakan yang sudah mereka canangkan dan jalankan.

Salah satu program lain yang cukup menari perhatian adalah program PRODUTA (Program Dua Ratus Juta). Program ini merupakan program yang ada di masa kepemimpinan Walikota Neni Moerniaeni. Sebelumnya program ini adalah program seratus juta, namun ternyata dalam realisasinya terkadang dana yang cair tidak sampai seratus juta. Kemudian di kepemimpinan ini Neni justru menaikkan nominalnya menjadi dua ratus juta, dimana dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan bantuan permodalan bagi masyarakat miskin. Akan tetapi jika kita logikakan lagi dengan dana seratus juta pemerintah belum mampu memenuhi seutuhnya. Yang menjadi problem saat ini adalah nominal yang ada justru naik dua kali lipat sehingga ini akan menjadi problem kembali ketika dana tersebut tidak mampu terealisasi nantinya.

Selain adanya program kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Bontang ada juga program kebijakan yang bekerja sama dengan provinsi. Seperti misalnya program KUBE FM (Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin) untuk membantu masyarakat miskin melalui wirausaha. Program ini dilakukan berdasarkan kelompok-kelompok yang dibentuk oleh masyarakat. Setidaknya ada 60 kelompok yang terdaftar di program KUBE FM tersebut. Program ini mendapatkan bantuan dana dari pemerintah untuk dijadikan modal awal usaha mereka. Biasanya masyarakat melakukan usaha rumahan dalam program ini. Selain adanya KUBE FM tersebut ada juga program bedah rumah yang dilakukan Pemkot dan Pemprov. Pada bantuan ini masyarakat yang mendapat bantuan bedah rumah melalui tahapan seleksi. Bantuan yang diberikan pun tidaklah secara menyeluruh. Maksudnya adalah pemerintah memberikan dalam nominal tertentu untuk membeli bahan bangunan semata. Selebihnya seperti biaya pembangunan dan bahan baku lain yang masih dibutuhkan merupakan biaya dari masyarakat itu sendiri tanpa ada bantuan lain.

Hasil dari adanya program KUBE FM salah satunya adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM). Program seperti ini memiliki potensi pendanaan dari pemerintah untuk pendirian usahanya. Namun sayangnya dalam realisasi UMKM ada kendala yang terjadi. Kendala atau kesulitan tersebut adalah sulitnya akses terhadap kredit, lemahnya kemampuan pemasaran masyarakat, kurangnya pelatihan yang di dapat, kurang berkembangnya koperasi dan sulitnya mencari bapak angkat (Purwanto, 2007). Adanya program-program tersebut sebagai upaya kepemimpinan yang ada untuk mewujudkan kebutuhan tempat tinggal dan mata pencaharian untuk penduduk miskin. Selain itu ini juga dapat memperlihatkan sinergi yang apik yang dilakukan pemimpin dengan provinsi. Adanya hal ini berarti pemimpin berusaha memperlihatkan kepemimpinannya melalui pencukupan kebutuhan pokok untuk masyarakatnya. Selain itu masyarakat miskin juga secara tidak langsung dilatih untuk mandiri dan tidak

bergantung pada bantuan pemerintah. Salah satu upaya memandirikan masyarakat miskin tersebut dengan memberikan program bantuan yang berupa permodalan atau bantuan usaha.

Selain itu salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintahan untuk menangani kemiskinan ini utamanya untuk masyarakat pesisir adalah dengan memberikan bantuan pembangunan jamban. Program ini merupakan salah satu perwujudan dari program pemerintah pusat yakni KOTAKU. Program ini merupakan program dicanangkan untuk memperbaiki lingkungan hidup yang lebih layak agar memberikan dampak kesehatan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat yang tinggal di daerah kumuh. Program KOTAKU ini merupakan program dari pemerintah pusat. Bentuk dari pembangunan ini seperti semenisasi jalan, pembuatan jamban dan sanitasi kepada masyarakat yang hidup di rumah kumuh. Di Kota Bontang sendiri untuk program KOTAKU ini dijalankan di Kelurahan Berbas Pantai, di mana kondisi lingkungan masyarakat masih kumuh. Program KOTAKU ini sendiri merupakan program pengentasan kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan dijalankan oleh pemerintahan daerah masing-masing.

Selain kebijakan yang dibuat dan diberlakukan dari pemerintah daerah sendiri, pemerintah juga menjalankan program kebijakan dari pemerintah provinsi dan pusat dengan cara berbeda. Cara ini merupakan sebuah inovasi yang dilakukan pemerintah Bontang di bawah Kepemimpinan Walikota saat ini. Inovasi yang dilakukan memanfaatkan kecanggihan teknologi tahu mengikuti arus modernisasi yang ada. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bontang adalah dengan menggunakan program E-Warung untuk mengimplementasikan kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dari pemerintah pusat. E-Warung sendiri hingga saat ini sudah disediakan sebanyak 8 tempat yang terletak di tiga Kecamatan Bontang. Dengan menggunakan sistem E-Warung ini masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan dapat mencairkan dana sebesar Rp. 110.000,-. Dengan nominal tersebut masyarakat dapat menukarnya dengan beras dan atau telur. Uang yang digunakan pun merupakan uang elektrik dengan menggunakan kartu semacam ATM. Dengan diberlakukannya program seperti itu selain pemerintah mampu berinovasi juga memudahkan masyarakat untuk mengakses program kemiskinan tersebut.

Pada dasarnya Kota Bontang merupakan kota yang memiliki potensi yang tinggi. Selain potensi migasnya yang merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Bontang juga memiliki potensi lain. Potensi tersebut seperti perkebunan, pertanian, dan hasil lautnya yang cukup menjanjikan. Hadirnya migas tentunya tidak bisa dijadikan jaminan untuk keberlanjutan Kota Bontang. Pasalnya migas merupakan sumber daya yang tidak dapat terbaharui dan suatu saat akan habis. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin saat ini untuk mempersiapkan alternatif bagi keberlangsungan Kota Bontang. Setidaknya pada tahun 2015 diperoleh hasil dari Pendapatan Domestik Regional Bruto yang melibatkan hasil migas di dalamnya dengan harga berlaku sebesar 59,85 triliun rupiah, sedangkan dengan harga konstan Pendapatan Domestik Regional Bruto yang dihasilkan sebesar 40,24 triliun

rupiah. Dengan adanya hasil migas tersebut perekonomian Kota Bontang mengalami perkembangan ke arah yang positif. Terlihat dengan selama periode 2011 hingga 2015 pertumbuhan ekonomi Kota Bontang meningkat dari -7,4 persen pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan positif 3,4 persen pada tahun 2015 (Pemerintah Kota Bontang, 2017). Itu bukanlah angka yang kecil untuk perekonomian sebuah kota, dengan adanya keuntungan tersebut tentunya akan ada per sekian persen yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan di Kota Bontang. Dengan adanya sumber daya yang potensial tersebut akhirnya menjadikan tugas bagi pemimpin saat ini untuk memanfaatkan secara optimal potensi tersebut guna mewujudkan angka penurunan kemiskinan.

Sesuai dengan visi pemerintahan Kota Bontang saat ini “Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri Yang Bertumpu Pada Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Dengan visi tersebut maka tak heran jika salah satu sumber yang diandalkan pemerintah adalah industri. Seperti yang kita ketahui, seorang pemimpin politik dapat dikatakan sebagai pemimpin politik apabila ia mampu menguasai unit-unit sumber potensi yang ada untuk dikelola demi mewujudkan kebaikan bersama (Mahyudin & Alfian, 2009). Hal itulah yang saat ini coba dilakukan oleh kepemimpinan Neni. Menyadari bahwa migas tidak akan mampu bertahan terus menerus maka ia mencoba membangun sektor pariwisata dan industri yang ada di Kota Bontang.

Dalam hal pariwisata pemerintah melakukan tahapan awal dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat. Pelatihan ini disebut pelatihan sadar wisata oleh pemerintah Kota Bontang. Dengan adanya pelatihan tersebut pemerintah berharap akan ada kegiatan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat sekitar objek wisata. Selain itu dengan adanya pelatihan ini nantinya ketika sudah terealisasi selain akan berpengaruh terhadap ekonomi, akan membantu memberantas kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sebagai salah satu sumber pekerjaan dan penghasilan utamanya masyarakat miskin di sekitar objek wisata tersebut. Selain potensi wisata yang dimiliki perairan Bontang juga memiliki hasil yang cukup menjanjikan. Seperti misalnya hasil rumput laut Kota Bontang yang terkenal memiliki kualitas yang baik. Selain itu perairan Kota Bontang juga memiliki potensi untuk menunjang industri yang ada. Dengan adanya jalur ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia II) mendukung perindustrian Bontang karena wilayah ini merupakan jalur pendistribusian internasional (Prokal.com (daring). 2018). Selain dari sektor kelautan Bontang juga memiliki potensi dalam bidang pertanian dan perkebunan. Dari data yang diperoleh melalui BPS sektor pertanian dan perkebunan Kota Bontang pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 20,28%. (Badan Pusat Statistik Bontang)

Dengan adanya sumber potensi dari pertanian dan perkebunan tersebut maka masyarakat miskin yang tidak memiliki pekerjaan tetap dapat bekerja dibidang tersebut. Pemerintah dapat memberikan bantuannya melalui pemberian bibit ataupun alat bertani untuk mewujudkan keberhasilan sektor potensi tersebut. Saat ini untuk memajukan Kota Bontang Pemerintah melakukan pembangunan industri.

Terlihat dari upaya pemerintah untuk menarik minat investor masuk ke Kota Bontang dan mendirikan sebuah industri. Salah satunya yang terjadi di daerah Segendis dimana saat ini dilakukan pembangunan pabrik minyak kelapa sawit. Dengan hadirnya pembangunan industri tersebut tentunya akan memberikan pengaruh terhadap masyarakat miskin yang ada di Kota Bontang. Pasalnya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dapat dipekerjakan dalam pembangunan industri tersebut. Bahkan ketika industri tersebut nantinya sudah berjalan maka akan ada lapangan pekerjaan pasti bagi masyarakat Kota Bontang. Namun yang terjadi di lapangan ternyata masih banyak tenaga kerja yang terserap berasal dari luar Kota Bontang. Padahal seharusnya setidaknya 70% pekerja berasal dari Bontang. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah dan kurang ditegakkannya peraturan yang ada. Padahal jika kebijakan dan peluang tersebut mampu dijalankan seoptimal mungkin maka akan sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Bontang.

Selain adanya pembangunan industri dan pemanfaatan sektor pariwisata untuk penurunan angka kemiskinan, pemerintah Kota Bontang juga memanfaatkan hadirnya industri-industri yang ada. Pemanfaatan hadirnya peran dari industri ini adalah melalui forum CSR (*Corporate Social Responsibility*) dimana perusahaan memberikan sebagian penghasilan mereka untuk pemberdayaan masyarakat. Hadirnya perusahaan besar seperti PT. Badak dan PT. Pupuk Kaltim memberikan cukup banyak bantuan bagi masyarakat miskin di Bontang. Seperti misalnya PT. Pupuk Kaltim yang memberikan bantuan melalui pemberdayaan kepada masyarakat pesisir. Di Bontang sendiri untuk forum CSR pemerintah sudah mewadahnya melalui sebuah forum yang memang mengatur kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya CSR ini dapat dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah ataupun perusahaan dengan masyarakat. Namun realitasnya yang lebih merealisasikan adalah perusahaan dengan pemerintah. Hal inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat seperti objek semata karena kurang terlibat dalam realisasi CSR tersebut. Inilah yang menjadi tugas tambahan dimana sudah baik ketika masyarakat tidak hanya diberi akan tetapi juga diberdayakan melalui bantuan CSR. Namun akan lebih optimal lagi ketika masyarakat mengikuti prosesnya dari awal dan ikut andil dalam pengambilan keputusan di forum CSR tersebut.

Jika kita lihat dari tipe kepemimpinannya dimana ia melakukan inovasi-inovasi kebijakan yang ada dan menciptakan kebijakan yang ada. Dapat dikatakan tipe kepemimpinan Neni ini lebih mengarah kepada tipe *administratoris*. Pasalnya dalam menangani masalah kemiskinan ia lebih menekankan melalui kebijakan yang ia buat. Selain itu ia juga melakukan perkembangan industri yang menuju arah modernisasi untuk menciptakan masyarakat sosialnya. Kurang ditemukan bahwa ia melibatkan rakyatnya dalam skala global untuk mengatasi masalah kemiskinan. pasalnya dalam hal pembuatan program ataupun prosesnya masyarakat kurang terlibat, karena masyarakat sendiri hadir sebagai objek dari program-program pengentasan kemiskinan tersebut. Itulah mengapa menurut analisis dari data-

data yang ada pada tipe kepemimpinan Walikota Bontang ketiga ini lebih condong ke arah pemimpin yang *administratoris*.

Selain itu untuk lebih *concern* kepada implementasi kebijakan yang ada pemerintah Kota Botang menjalankan kebijakan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah. Maksudnya disini adalah program pengentasan kemiskinan dijalankan sesuai dengan fokus dinas yang ada, seperti untuk nelayan yang miskin dikerjakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan. Hal tersebut bertujuan agar implementasi kebijakan yang ada berjalan secara optimal. Selain itu basis data penduduk miskin yang digunakan adalah melalui Dinas Sosial agar tidak ada penumpukan bantuan kepada satu masyarakat. Namun pada realitasnya sistem OPD ini menemui kendala yakni dalam masalah komunikasi. Karena fokus masing-masing dinas itulah yang mengakibatkan komunikasi yang terjadi menemui kendala dan justru kadang menjadikan bantuan yang ada menumpuk pada satu pihak. Inilah yang kemudian perlu untuk diperbaiki sistemnya agar benar-benar terimplementasi dengan baik kebijakan yang ada.

Program-program untuk pengentasan kemiskinan di Kota Bontang dapat dikatakan lebih mengarah kepada pembangunan. Dalam mewujudkan pembangunan tersebut pemerintah kurang melibatkan peranan rakyat. Maksudnya peranan di sini adalah masyarakat kurang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Akan tetapi masyarakat lebih dilibatkan sebagai objeknya yang menerima kebijakan tersebut. Selain itu pemerintah mengupayakan program-program pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan modernisasi dan teknologi. Salah satunya dengan berinovasi melalui kebijakan-kebijakan yang berbasis teknologi. Ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Neni sebagai Walikota Bontang, di mana di era kepemimpinannya ini ia sangat *concern* mengentaskan kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan yang ia buat. Kebijakan tersebut tidak hanya yang asli kebijakan Pemerintah Bontang tetapi juga kebijakan pusat dan provinsi yang telah di inovasi..

KESIMPULAN

Di masa kepemimpinan Walikota Bontang ini ia menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 4% sampai tahun 2021. Upaya penurunan angka kemiskinan ini dilakukan melalui program-program kebijakan. Program kebijakan tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, akan tetapi juga pemerintah provinsi dan daerah. Dalam pengembangannya kebijakan yang ada dijalankan dengan menginovasi kebijakan agar lebih mudah dijalankan. Hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah Bontang untuk menjalankan kebijakan yang ada sesuai dengan kemajuan teknologi.

Salah satu hal yang dilakukan oleh kepemimpinan ini selain mengatasi kemiskinan melalui kebijakan juga melalui cara lain. Salah satu yang dijadikan peluang oleh pemerintahan ini adalah dengan mulai melepas ketergantungan Bontang terhadap migas. Salah satu caranya adalah dengan membangun potensi yang dimiliki oleh Bontang dalam sektor pariwisata dan industri. Dengan adanya pembangunan

sektor pariwisata dan industri ini juga menjadi peluang untuk menurunkan angka kemiskinan. Dengan adanya upaya itu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan akan lebih besar lagi.

Walaupun memanfaatkan potensi yang ada seperti membangun pariwisata dengan melibatkan masyarakat langsung sebagai upaya penurunan kemiskinan. Pemerintah juga melibatkan sektor industri yang ada melalui pembiayaan CSR. Dan bahkan dalam realisasi pemanfaatan tersebut juga dikuatkan melalui peraturan pemerintah yang sah. Kepemimpinan Neni ini dapat dikatakan baik karena ia mampu memanfaatkan dan melibatkan sektor-sektor selain pemerintahan untuk andil dalam pengentasan kemiskinan. Inilah salah satu kemampuan yang memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

Di kepemimpinan Walikota Bontang ini dalam mengimplementasikan kebijakan kemiskinan yang ada kurang melibatkan peran masyarakat secara langsung. Pasalnya masyarakat sebagai objek semata untuk kebijakannya. Kurang keterlibatan masyarakat inilah yang kemudian menyebabkan kepemimpinan ini kurang bisa dikatakan sebagai *solidarity maker*. Melihat kepemimpinannya lebih condong ke arah tipe kepemimpinan administratif. Pasalnya ia mengentaskan kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan yang ada. Selain itu kebijakan ini memanfaatkan modernisasi dan teknologi seperti yang dicirikan pada tipe kepemimpinan administratif.

Melihat hal tersebut maka kepemimpinan Walikota Bontang saat ini lebih condong ke arah *administratoris*. Hal tersebut dikarenakan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ia cenderung menggunakan kebijakan melalui program pengentasan kemiskinan. Selain itu walaupun memanfaatkan sektor industri dan pariwisata kepemimpinan ini tidak melepaskan itu tanpa kebijakan. Maksudnya pemanfaatan sektor industri dan pariwisata tersebut juga dijadikan sebuah aturan kebijakan yang diperuntukkan pengentasan masalah kemiskinan. Inilah yang menjadikan sosok kepemimpinan Walikota Bontang saat ini merupakan tipe pemimpin *administratoris* dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, M., Djumlani, A., & Anggraeny, R. (2017). Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibilities (CSR) PT. Indo Tambangraya Megah Tbk Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kelurahan Bontang Lestari. *Jurnal Administrative Reform*, 1(2), 377-388.
- BPS Kota Bontang. (2018, August 18). Kota Bontang dalam Angka 2018. Kota Bontang.
- Fairchild, H. P. (2006). *Kartini Kartono*.
- Fitriastuti, T. (2011). Pengaruh tipe kepemimpinan pada persepsi politik dan outcomes organisasional dengan ingrasi sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Siasat Bisnis*, 15(2).
- Kartono, K. (1994). *Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Pemimpin Abnormal itu*. Jakarta.

- Laucereno, S. F. (2019, July 15). *Angka Kemiskinan di 6 Provinsi Ini Paling Cepat Naik*. Dipetik July 25, 2019, dari Detikfinance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4624537/angka-kemiskinan-di-6-provinsi-ini-paling-cepat-naik>
- Mahyudin, A. A., & Alfian, A. (2009). *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pemerintah Kota Bontang. (2017). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2016-2021*. Kota Bontang.
- Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji potensi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk pembuatan kebijakan anti kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(3), 295-324.
- Wijaya, P. (2018, Oktober 9). *Indonesia di Urutan ke-90 Negara dengan Ketimpangan Si Kaya dan Si Miskin*. Diambil kembali dari Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/dunia/indonesia-di-urutan-ke-90-negara-dengan-ketimpangan-si-kaya-dan-si-miskin.html>